

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Maret 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 4,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,39. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 5,09 persen dengan IHK sebesar 112,38 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sumbawa sebesar 3,92 persen dengan IHK sebesar 112,62.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran dari total sebelas indeks kelompok, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,13 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,21 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 5,61 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,06 persen; kelompok transportasi sebesar 0,76 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,30 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,93 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,79 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,03 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 21,60 persen. Sedangkan penurunan indeks kelompok pengeluaran terjadi pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,22 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Maret 2026 masing-masing sebesar 0,81persen dan 1,93 persen.

Berdasarkan press release BPS pada tanggal 1 April 2026, inflasi nasional untuk inflasi bulan ke bulan (Maret 2026 terhadap Ferbruari 2026) berada pada angka 0,41%. Sedangkan untuk inflasi Nasional tahun ke tahun (Maret 2026 terhadap Maret 2025) berada pada angka 3,48% Sedangkan Untuk inflasi bulan ke bulan (Maret 2026 terhadap Ferbruari 2026) Provinsi NTB berada pada angka 0,81% dan inflasi NTB tahun ke tahun (Maret 2026 terhadap Maret 2025) berada pada angka 4,09%. Inflasi bulan ke bulan untuk Kota Mataram sebesar 0,85%. Sedangkan Inflasi tahun ke tahun sebesar 3,98%. Untuk Kabupaten Lombok Barat angka inflasi mengacu pada Kota Mataram.

Andil beberapa komoditas terhadap inflasi/deflasi Maret 2026 (m-to-m) pada Kota Mataram (Kabupaten Lombok Barat mengacu pada Kota Mataram) untuk inflasi :Cabai rawit, daging ayam ras, emas perhiasan,bawang merah, dan ikan tongkol. Sedangkan untuk komoditas penyumbang deflasi Maret 2026 diantaranya angkutan udara, angkutan Sungai danau dan penyebrangan, minyak goreng, beras, dan kelapa

DAFTAR HARGA KEBUTUHAN POKOK STRATEGIS BERDASARKAN DATA SP2KP BULAN JANUARI S/D MARET 2026 PADA KAB. LOMBOK BARAT

NO	JENIS BARANG	SATUAN	BULAN			Koefision Harga Terhadap Waktu
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	
1	Beras Cap IR (Medium)	Kg	13.500	13.500	13.500	Stabil
2	Beras Cap Mataram (Premium)	Kg	14.500	14.500	14.500	Stabil

3	Beras Cap Padiku (Premium)	Kg	14.500	14.500	14.500	Stabil
4	Beras SPHP Bulog	Kg	12.000	12.000	12.000	Stabil
5	Kedelai Lokal,1 kg	Kg	15.000	15.000	15.000	Stabil
6	Kedelai Impor,1 kg	Kg	14.000	13.222	13.000	Stabil
7	Cabai Merah Keriting,1 kg	Kg	33.100	37.556	38.950	Stabil
8	Cabai Merah Besar,1 kg	Kg	27.500	35.778	40.150	Tidak Stabil
9	Cabai Rawit Merah,1 kg	Kg	47.300	89.778	97.300	Tidak Stabil
10	Cabai Rawit Hijau,1 kg	Kg	20.900	33.889	41.950	Tidak Stabil
11	Bawang Merah,1 kg	Kg	43.100	38.833	40.800	Stabil
12	Gula Pasir Curah, 1kg	Kg	17.250	17.500	17.500	Stabil
13	Gula Pasir Kemasan, 1kg	Kg	18.000	17.667	17.500	Stabil
14	Minyak Goreng Curah,1 lt	Kg	19.100	19.500	19.500	Stabil
15	Minyak Goreng Kemasan Premium,1 lt	Kg	20.500	20.500	20.500	Stabil
16	Minyakita,1 lt	Kg	15.700	15.700	15.700	Stabil
17	Tepung Terigu,1 kg	Kg	13.050	13.500	13.825	Stabil
18	Daging Ayam Ras Karkas,1 kg	Kg	40.000	40.167	42.900	Stabil
19	Telur Ayam Ras,1 kg	Kg	29.500	29.500	29.500	Stabil
20	Daging Sapi Paha Belakang,1 kg	Kg	130.000	133.667	139.800	Stabil
21	Daging Sapi Tetelan,1 kg	Kg	70.000	70.000	77.950	Stabil
22	Ikan Bandeng,1 kg	Kg	42.250	43.000	42.000	Stabil
23	Ikan Tongkol,1 kg	Kg	30.000	31.667	35.000	Stabil
24	Ikan Teri,1 kg	Kg	80.000	80.000	80.000	Stabil
25	Bawang Putih Honan,1 kg	Kg	35.450	35.722	35.000	Stabil
26	Bawang Putih Kating,1 kg	Kg	39.000	38.167	38.000	Stabil

27	Garam Halus,1 kg	Kg	10.000	10.000	10.000	Stabil
28	Susu Kental Manis, 370 gr	Kg	12.000	12.000	12.000	Stabil
29	Susu Bubuk (Setara Dancow),400 gr	Kg	42.450	43.000	43.000	Stabil
30	Udang Basah,1 kg	Kg	62.750	65.000	65.400	Stabil
31	Tomat,1 kg	Kg	11.700	11.889	13.300	Stabil
32	Kentang Sedang,1 kg	Kg	18.000	18.000	18.000	Stabil
33	Sawi Hijau,1 kg	Kg	8.000	8.000	8.000	Stabil
34	Kangkung,1 kg	Kg	5.150	6.167	7.000	Tidak Stabil
35	Ketimun Sedang,1 kg	Kg	6.000	6.000	6.000	Stabil
36	Kacang Panjang,1 kg	Kg	8.000	8.000	8.550	Stabil
37	Ayam Kampung Utuh,1 ekor	Kg	65.000	65.000	66.200	Stabil
38	Telur Ayam Kampung,1 kg	Kg	54.000	54.000	54.000	Stabil

Sumber Data Disperindag Kab. Lombok Barat

**GRAFIK INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (IPH) KAB. LOMBOK BARAT BULAN
JANUARI S/D MARET 2026**



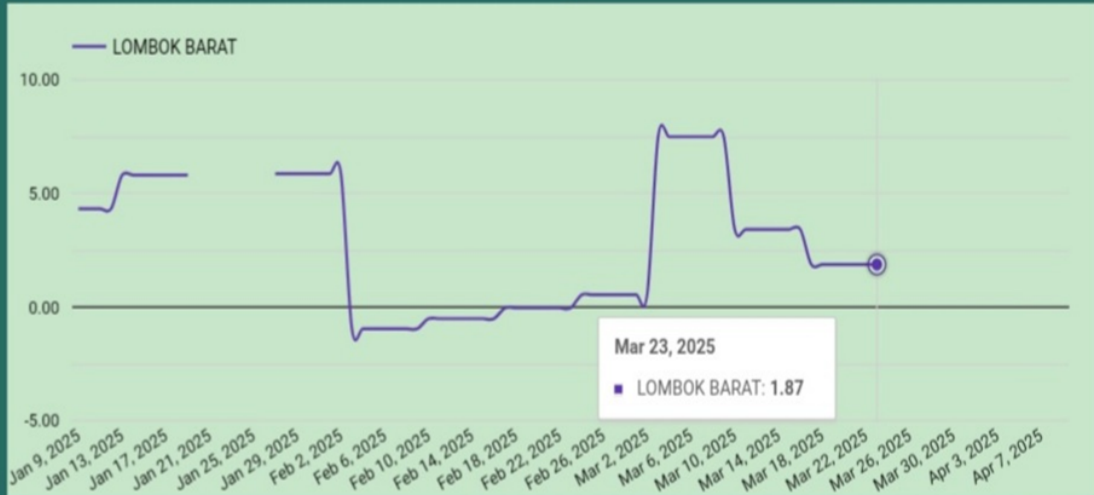
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Provinsi: NUSA TENGGARA BARAT (1) ▾

Kabupaten: LOMBOK BARAT (1) ▾

Indeks Perkembangan Harga (IPH)

Jan 9, 2025 – Apr 9, 2025 ▾



Sumber : Kementerian Perdagangan

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Lombok Barat

Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang terjadi pada M4 bulan Januari berada pada angka -2,45%% yang mengalami kenaikan menjadi 4,53% pada M1 Februari yang disebabkan antara lain :

- Adanya pengawasan distribusi serta dukungan pasokan dari kabupaten tetangga dan musim panen di petani local

Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang terjadi pada M4 bulan Februari berada pada angka 5,27% dan mengalami penurunan M1 Maret menjadi 1,15% yang disebabkan antara lain:

- Penurunan ketersediaan komoditas cabai rawit dan cabai merah besar karena cuaca ekstrim (hujan deras) membuat cabai cepat membusuk.
- Komoditas bawang merah dan bawang putih adalah komoditas musiman dimana Kabupaten Lombok Barat bukan produsen.

Berdasarkan hasil pemantauan harga bahan kebutuhan pokok yang dilakukan di Pasar Gerung Kabupaten Lombok Barat oleh Dinas Perdagangan Kab. Lombok Barat, selama bulan Januari sampai dengan sampai dengan bulan Maret pada Triwulan Pertama tahun 2026 Triwulan I tahun 2026 (Januari-Maret), perkembangan harga barang kebutuhan pokok di Pasar Gerung menunjukkan dinamika yang bervariasi, dipengaruhi oleh faktor musiman, distribusi barang, serta tingkat permintaan masyarakat. Secara umum, harga beberapa komoditas mengalami fluktuasi harga, namun secara keseluruhan tetap dalam kondisi terkendali.

Selama periode ini terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditi seperti daging ayam ras,

daging sapi, cabai rawit, cabai merah besar, cabai keriting, bawang merah, dan tomat yang dipengaruhi oleh musim tanam, dan bulan suci ramadan, sehingga berdampak pada harga barang kebutuhan pokok mengalami fluktuasi harga.

Dari sisi lain komoditas beras, gula pasir, dan minyak goreng kemasan, ikan segar dan sayur-mayur relatif stabil selama triwulan ini. Stabilitas ini tercapai berkat adanya pengawasan distribusi serta dukungan pasokan dari kabupaten tetangga dan musim panen di petani lokal, harga telur ayam ras dan tepung terigu juga menunjukkan tren yang cenderung stabil, dengan fluktuasi harga dalam batas yang wajar.

Adapun beberapa komoditas seperti cabe rawit, cabe merah besar dan cabe keriting mengalami penurunan harga pada triwulan ini, seiring dengan meningkatnya hasil panen lokal dan melimpahnya pasokan dari petani lokal.

Secara umum, kondisi harga barang kebutuhan pokok di Pasar Gerung pada Triwulan I masih tergolong berfluktuasi harganya, meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga akibat faktor perayaan, musiman tanam, dan distribusi, Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan stakeholder terkait guna menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang di pasar.

Berdasarkan hasil pantauan Dinas Pertanian di triwulan I, Adapun komoditi Beras pada Triwulan I ini harganya cukup signifikan, dengan rata rata harga Rp 14.000,- (Empat Belas Ribu Laporan TPID Triwulan I Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat Rupiah) sampai Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah). Di Kabupaten Lombok Barat setiap hari ada panen padi namun kondisi saat ini belum mampu menurunkan harga beras. Hal ini disebabkan oleh Harga GKP (Gabah Kering Panen) dari petani ke pengepul/pelaku usaha beras masih cukup tinggi dimana dari bulan Januari - Maret 2026 rata - rata GKP masih diangka Rp 7.300,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah)/kg diatas HPP yang ditetapkan Pemerintah. Tingginya harga cabe.di sebabkan oleh gagalnya program bantuan Cabe ke masyarakat yang berkisar antara 95% disebabkan oleh Intensitas curah hujan yang tinggi serta hanyutnya tanaman cabai dilahan sawah yang disebabkan oleh banjir. Walaupun harga cabe di pasar Tradisional Kabupaten Lombok Barat terbilang Tinggi Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 3 bulan terakhir namun stock cabai di pasaran cukup tersedia. Tingginya harga cabai tidak terlalu berpengaruh pada masyarakat karena Pemerintah Kabupaten Lombok Barat khususnya TENTAKEL (Tenten Tani Keliling) Pertanian gencar melakukan pasar murah (OPM) ke desa-desa yang tidak menjadi sentra cabai dengan harga dibawah harga pasar/harga jual petani.

Berdasarkan hasil pantauan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan kabupaten lombok barat triwulan I tahun 2026 pada bulan Januari 2026, minggu ke II sampai dengan Februari minggu ke I Tahun 2026 harga bawang merah mengalami penurunan harga yang berkisar antara Rp. 43.857/Kg sampai dengan Rp. 35.857/Kg. Namun pada minggu ke II bulan Februari bawang merang mengalami kenaikan harga yag cukup melonjak dari minggu sebelumnya yaitu Rp. 38.000/Kg - Rp. 40.667/Kg sampai dengan minggu terakhir dibulan maret 2026. Kenaikan harga harga bawang merah disebabkan karena pasokan yang kurang karena iklim, permintaan yang banyak karena menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) seperti Hari Raya Idul Fitri. Selain bawang merah cabai - cabaian juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi mulai dari cabai keriting yang mengalami kenaikan hrage pada bulan februari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir di bulan maret yang berkisar antara Rp. 34.000/Kg - Rp. 41.000/Kg. Cabai Rawit mengalami kenaikan mulai dari

Januari minggu ke III sampai dengan minggu terakhir bulan maret 2026 yaitu dari harga Rp. 41.000 - 108.333. Cambai merah besar juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi mulai dari Februari minggu I sampe dengan maret minggu terakhir yaitu berkisar antara Rp. 32.000/Kg - Rp. 46.000/Kg. Daging sapi juga mengalami kenaikan mulai dari bulan Februari minggu pertama samapai dengan maret minggu terakhir yaitu berkisar dari haraga Rp. 131.000/Kg - 141.500/kg. Sedangkan untuk komoditas pangan yang lain dengan harga yang masih stabil dan masih terjangkau untuk daya beli masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kabupaten Lombok Barat masih banyak bergantung pada pasokan bahan pokok dari luar daerah, seperti Kabupaten tetangga bahkan dari Pulau Bali atau Jawa.

Hal ini menyebabkan :

- Harga bahan pokok sangat rentan terhadap gangguan distribusi (cuaca, infrastruktur, dan biaya transportasi).
 - Kenaikan harga bahan bakar langsung berdampak pada harga komoditas
2. Ketergantungan terhadap Musim (Musiman)
 - Produksi pangan sangat bergantung pada musim tanam yang belum sepenuhnya dikelola dengan sistem irigasi modern.
 - Ketika musim kemarau, produksi menurun, memicu kenaikan harga.
 3. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dalam pengendalian harga terkait komoditas tersebut diatas antara lain :
 - Bahwa pada musim panen padi saat ini (Januari-Maret) rata-rata GKP Petani dijual dengan harga 7.000,00 s/d 7.300,00/kg- diatas HPP, hal ini mempengaruhi tingginya harga beras berada di harga Rp 14.000 s/d 15.000,- dipasar tradisional
 - Fluktuasi harga cabai kurangnya produksi karena Gagalnya program bantuan cabai kemasyarakat yang di tanam pada bulan Desember 2026 disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan tanaman cabai dilahan sawah dihanyutkan oleh banjir sekitar 95%.
 - Kurangnya Pasokan cabe dan bawang merah dari petani baik dari petani dalam Kabupaten dan luar daerah terkendala dengan cuaca ekstrim dan banjir sehingga harga cabai rawit merah dan bawah merah tetap berada diambang batas atas harga normal.
 - Dukungan anggaran APBD untuk kegiatan pengembangan komoditi Bawang berkurang terkait budidaya, pasca panen serta dukungan SDM kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
 - Kurangnya intensitas koordinasi dan komunikasi dengan stake holder terkait seperti pengepul, pengusaha dan aparat penegak hukum, ketika harga komoditi melambung tinggi, tindakan pemantauan dan pengawasan dilapangan ditingkatkan namun kurangnya kepedulian Pemerintah Daerah saat harga cabai anjlok (harga tidak menguntungkan petani).
 4. Permasalahan utama pengendalian inflasi Daerah diantaranya:

Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan, permasalahan daerah yang memiliki tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi.

- Kesenjangan informasi dan distorsi struktur pasar, kesenjangan informasi antar pelaku ditengah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga dipasar
- Produktivitas pangan yang berkurang / tidak optimal karena adanya kendala iklim yang tidak menentu khususnya di Kabupaten Lombok Barat.
- Ketersediaan beberapa bahan pangan didaerah berkurang karena terjadinya pola tanam yang berubah sehingga memerlukan pasokan ketersediaanya berasal dari antar daerah

5. Kenaikan harga komoditas perikanan disebabkan karena perubahan cuaca terutama untuk jenis-jenis ikan hasil tangkapan seperti ikan tongkol dan ikan kembung di awal januari- pertengahan Februari) sedangkan untuk perikanan hasil budidaya relatif stabil hal ini disebabkan terjaminnya ketersediaan ikan dan stabilnya harga dan pasokan pakan ikan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2026

I. KETERJANGKAUAN HARGA

MELAKUKAN OPERASI PASAR/GERAKAN PANGAN MURAH/PASAR TANI

- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM)/Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Tani bersinergi dengan Bank Indonesia (BI), Bulog dan OPD terkait secara berkala.
- Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pakan sebagai penyebab utama kenaikan harga ikan khususnya ikan budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tetap melakukan pemantauan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan di masing-masing wilayah. Selain itu untuk ketersediaan komoditas ikan pemantauan dilakukan di Cold Storage yang ada di Dusun Ireng Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari dan sentra pemindangan di Kecamatan Batulayar.
- Untuk kegiatan survey harga pasar dilakukan setiap hari oleh Disperindag, Dikpangan dan Diperta Kab. Lobar pada pada Pasar Kediri dan Pasar Gerung. Melaporkan pergerakan harga komoditas rutin melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) untuk memonitor Perkembangan Harga secara harian. Data atas laporan indeks perkembangan harga (IPH) yang digunakan sebagai laporan Ke Kemendagri adalah data yang diperoleh dari Disperindag Kab.Lobar yang kemudian akan di laporkan ke Itjen Kemendagri oleh Inspektorat. Data terkait indeks perkembangan harga (IPH) Kabupaten Lombok Barat dapat diakses melalui <http://s.bps.go.id/iphlobar>. Dan untuk update harga Kabupaten Lombok Barat dapat diakses melalui <http://s.bps.go.id/updatepasarlobar>. Selain itu dapat juga diakses melalui <https://silakniki.lombokbaratkab.go.id/>

JADWAL PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH (OPM) DAN GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) BULAN JANUARI S/D MARET 2026

NO LOKASI	KECAMATAN	TANGGAL KEGIATAN	KET.
------------------	------------------	-------------------------	-------------

▪

1	Desa Lembah Sempaga	Narmada	11 Februari 2026	OPM
2	Aula Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat	Labuapi	11 Februari 2026	TENTAKEL
3	Desa Lembar Selatan	Lembar	13 Februari 2026	OPM
4	Halaman Kantor Dinas Pertanian	Labuapi	13 Februari 2026	TENTAKEL
5	Halaman Masjid Baital Atiq Gerung	Gerung	16 Februari 2026	TENTAKEL
6	Desa Bajur	Labuapi	20 Februari 2026	OPM
7	Halam Kantor Desa Kediri Induk	Kediri	24 Februari 2026	TENTAKEL
8	Halaman Kantor Desa Lembar Selatan	Lembar	25 Februari 2026	TENTAKEL
9	Halaman Kantor Desa Badrain	Narmada	26 Februari 2026	TENTAKEL
10	Halaman Masjid Plempat Desa Meninting	Batulayar	27 Februari 2026	OPM
11	Desa Bug - Bug	Lingsar	4 Maret 2026	OPM
12	Desa Guntur Macan	Gunungsari	5 Maret 2026	OPM

II. KETERSEDIAAN PASOKAN

MELAKSANAKAN SIDAK PASAR DAN SIDAK GUDANG DISTRIBUTOR

- Melaksanakan pemantauan harga bahan pokok di pasar-pasar induk setiap hari kerja dan gudang-gudang penyedia stok komoditas tertentu, seperti beras, minyak goreng, gula dan LPG dan melakukan Pengawasan/Sidak Gudang Alfamart, Gudang Jembatan Baru, Pasar, dan SPBE Lombok Energy Gas dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Hari Raya Idul Fitri 1447H guna mengecek ketersediaan pasokan jelang hari raya.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SIDAK PASAR DAN SIDAK GUDANG DISTRIBUTOR BULAN JANUARI S/D MARET 2026

NO	TANGGAL SIDAK	LOKASI SIDAK	KECAMATAN	KETERANGAN
1	28 Januari 2026	Pasar Narmada SPPBE PT. Harapan Jaya Utama	Narmada Narmada	Sidak/ Pengawasan
2	4 Februari 2026	Bulog SPPBE PT. OM AGUS	Lembar Lembar	Sidak/ Pengawasan

OPERASI PASAR PENYALURAN BERAS SPHP

Bulog melaksanakan kerjasama dengan pedagang selaku mitra bulog untuk menyalurkan beras SPHP di 4 Pasar kecamatan dan Pasar Gerung menjadi salah satu acuan untuk melaksanakan Operasi Pasar khusus untuk penyaluran beras SPHP dengan melibatkan Pimpinan beserta Kepala OPD yang tergabung dalam Tim TPID Tingkat Kab. Lobar. Pendropan Beras SPHP dilaksanakan 2 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari senin dan kamis dengan jumlah 1,5 - 2 ton per satu kali dropping untuk tiap mitra bulog

III. KELANCARAN DISTRIBUSI

1. Pengaturan dan pengawasan kendaraan angkutan barang

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari, mulai dari Januari s/d Maret 2026, adapun personil yang dilibatkan diganti setiap bulannya. Setiap bulannya, jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 9 orang dengan lokus kegiatan pada Tempat Parkir Khusus Segenter. Penertiban ini bertujuan untuk memberikan ruang parkir bagi kendaraan barang yang notabene adalah kendaraan besar agar tidak melakukan parkir di bahu jalan. Adapun kendaraan yang parkir sebagian besar adalah kendaraan yang akan menuju Pelabuhan Lembar maupun pelabuhan Gili Mas dengan tarif yang sangat terjangkau. Ketersediaan ruang parkir ini cukup penting dalam rangka memperlancar arus lalu lintas terlebih pada ruas jalan utama menuju Pelabuhan. Dengan lancarnya arus lalu lintas, maka arus distribusi barang, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder menjadi lancar juga, tiba tepat waktu dan mengurangi biaya distribusi. Setiap harinya, personil mencatat/mendata kendaraan yang melakukan parkir di Segenter. Adapun jumlah kendaraan angkutan barang yang parkir pada Tempat Parkir Khusus Segenter dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2026 adalah sebanyak 380 unit

2. Pengujian Laik Jalan Kendaraan

Adapun aktifitas yang dilaksanakan antara lain:

- Pelaksanaan uji berkala pada kendaraan angkutan orang dan barang
- Pemberian rekomendasi laik jalan bagi kendaraan yang memenuhi syarat keamanan dan keselamatan
- Pengawasan angkutan orang dan barang yang tidak laik jalan

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan setiap hari Senin s/d Sabtu di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Dampak yang ditimbulkan terhadap pengendalian inflasi adalah Memastikan kendaraan angkutan orang dan barang yang beroperasi sudah laik jalan, sehingga resiko kecelakaan lalu lintas yang menghambat distribusi barang dapat dikurangi.

3. Pengawasan lalu lintas dan penertiban areal terminal

Lokasi Pelaksanaan penertiban terminal adalah pada sejumlah terminal di wilayah Kabupaten Lombok Barat, diantaranya :

- Shelter Narmada
- Shelter Gunungsari
- Shelter Keru
- Shelter Kediri
-

Adapun aktifitas yang dilaksanakan adalah :

- Penertiban areal terminal untuk kelancaran arus keluar masuk kendaraan angkutan penumpang dan barang menuju terminal dan pasar
- Pengawasan kelancaran lalu lintas pada seluruh terminal, terlebih pada hari pasaran maupun menjelang Hari Raya

Dampak terhadap pengendalian inflasi antara lain :

- Memberikan akses bagi kendaraan barang yang mengangkut barang komoditas pangan untuk dibawa ke pasar tanpa dihalangi oleh pedagang bakulan yang menempati areal terminal
- Mencegah kendaraan angkutan untuk menaikturunkan penumpang di badan jalan, yang dapat menimbulkan kemacetan di sekitar pasar
- Menertibkan pengelolaan lapak terminal sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mencegah premanisasi dalam penetapan sewa lapak yang terlalu tinggi

IV. KOMUNIKASI EFEKTIF

RAPAT KOORDINASI/HIGH LEVEL MEETING (HLM) TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH (TPID)

- Melaksanakan rapat koordinasi TPID Kabupaten Lombok Barat Bersama dengan stakeholder terkait, setiap minggu dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
- Sinergi pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan forkompimda Kabupaten Lombok Barat.

Produk Kebijakan yang terbit pada triwulan 1 terkait pengendalian inflasi di daerah :

Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 100.3.3.2/222/EKON-ADPEM/2026 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi di Daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Keterbatasan Anggaran bersumber APBD dalam pelaksanaan pengendalian Inflasi, terutama terhadap program subsidi transportasi untuk mendukung kegiatan distribusi dalam pelaksanaan operasi pasar/Gerakan pangan/Pasar tani.
- Masih terdapat kendala dalam pemeliharaan jaringan terhadap pengembangan Web Silakniki (sistem pelaporan harga terkini) untuk memberikan informasi terkait harga dan kegiatan dalam pengendalian inflasi serta melakukan bimtek kepada tenaga operator web silakniki.
- Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan.
- Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi serta indikasi surplus devisit pangan di masing-masing daerah.
- Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi daerah untuk tahun anggaran 2026 berupa pemberian subsidi transportasi pada saat pelaksanaan

kegiatan operasi pasar murah.

- Terkait penyaluran BLT DD, sudah 56 desa dari 119 desa yang sudah cair DD tapi yang melaporkan sudah Salur BLT DD untuk bulan Januari s/d Maret 2026 baru satu (1) Desa yaitu Desa Jeringo sedangkan sisanya masih sedang berproses di Administrasi Keuangan. Untuk itu pihak Dinas PMD tetap melakukan pemantauan dan tetap berupaya agar BLT DD dapat tersalur tepat waktu. Sedangkan untuk program ketahanan pangan sampai dengan bulan Maret masih belum ada pemerintah desa yang melakukan eksekusi, hal ini disebabkan karena untuk program ketahanan pangan ada kaitannya dengan proses perencanaan dan rembug kelompok masyarakat.
- Dari hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, ditemukan berbagai permasalahan sebagai berikut :
 1. Belum adanya personil PPNS yang memadai untuk melakukan penindakan/penertiban dalam kegiatan pengawasan kendaraan laik jalan
 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan angkutan / orang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan
 3. Belum adanya fasilitas yang memadai di Tempat Parkir Khusus Segenter bagi pengemudi yang melakukan parkir kendaraan
 4. Masih kurangnya fasilitas yang memadai pada lokasi terminal yang bersinggungan dengan pasar
 5. Masih kurangnya ketersediaan angkutan umum pedesaan yang melayani trayek menuju pusat perekonomian

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Agar inflasi dapat terjaga berada pada kisaran angka sesuai target Nasional, sehingga dapat menjamin dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan terus melakukan pengecekan harga harian di pasar tradisional dan terus melaporkan hasil harga pasar kepada Pemerintah Pusat melalui SP2KP.
- Agar Tim TPID semakin solid melakukan upaya pengendalian inflasi di daerah dengan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti melakukan kegiatan operasi pasar, sidak pasar, Gerakan menanam, serta penggunaan dana BTT dalam pengendalian inflasi di daerah
- Agar pemanfaatan aplikasi digital seperti QRIS dan sejenisnya semakin dikembangkan sehingga dapat membantu Pemasaran produk UMKM melalui Aplikasi dan QR Code E-LAPAK SITEBEL dan QR Code E-LAPAK SITEBEL diharapkan dapat merambah hingga ke Hotel-Hotel yang berada di Lombok Barat.
- Dukungan dan perhatian Pemerintah Pusat terhadap pengendalian inflasi daerah semakin meningkat melalui pengalokasian dana, sarana dan prasarana dalam pengendalian Inflasi.
- Untuk menjaga kestabilan harga di sektor kelautan dan perikanan upaya yang dilakukan antara lain : Bantuan Bibit dan Pakan, Bantuan peralatan penangkapan, Fasilitasi pembangunan pakan mandiri, dan fasilitasi pembangunan unit pengolahan ikan. Memaksimalkan pemanfaatan gudang penyimpanan (cold storage) yang dapat memperpanjang masa penyimpanan produk perikanan sehingga gejolak harga dapat dikendalikan
- Intervensi pemerintah juga dibutuhkan dalam hal penyediaan anggaran untuk mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi seperti operasi pasar murah. Subsidi harga pada saat terjadi kenaikan harga ikan.
- Memaksimalkan pemanfaatan gudang penyimpanan (cold storage) yang dapat memperpanjang masa penyimpanan produk perikanan sehingga gejolak harga dapat

dikendalikan.

- Mengupayakan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dapat tersalurkan tepat waktu agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
- Mengupayakan agar Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes) berjalan sesuai dengan rencana berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa di 119 desa se kabupaten Lombok Barat.
- Memfasilitasi Masyarakat Desa agar memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Pengembangan Desa Wisata Sayur dapat segera terealisasi dengan memanfaatkan dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa yang berkoordinasi dengan dinas instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.
- Rekomendasi kebijakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat :
 1. Meningkatkan efisiensi produksi pertanian dengan memperbaiki infrastruktur pertanian, meningkatkan akses ke teknologi pertanian yang modern, dan memberikan pelatihan yang berkualitas kepada
 2. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menggalakkan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan, serta mengoptimalkan pengelolaan air dan lahan pertanian.
 3. Mendorong diversifikasi usaha pertanian dengan memberikan pelatihan kepada petani untuk mengembangkan komoditas pertanian yang beragam, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada satu komoditas saja.
 4. Memperkuat pasar pertanian dengan meningkatkan akses petani ke pasar yang lebih luas, memperbaiki infrastruktur pasaran, serta mengimplementasikan regulasi yang memungkinkan terciptanya pasar yang sehat dan berdaya saing.
 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas stok pangan dengan mengoptimalkan regulasi impor dan ekspor, serta mendorong keberlangsungan kegiatan riset dan pengembangan pertanian.
- 6. Mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang sehat dan berkelanjutan, untuk mengurangi tekanan permintaan terhadap pangan dan mereduksi inflasi.
- 7. Mendukung pembentukan koperasi pertanian, untuk membantu petani dalam memperoleh harga yang adil dan mengurangi biaya
- Rekomendasi kebijakan pada Dinas perhubungan Kab. Lombok Barat :
 1. Perbaikan Fasilitas Pendukung di setiap tempat parkir, terminal dan Pelabuhan Pengumpan

Ketersediaan terminal maupun pelabuhan cukup penting dalam kelancaran transportasi. Untuk itu fasilitas pendukung terus ditingkatkan pada terminal di Kabupaten Lombok Barat, khususnya tempat parkir khusus angkutan barang. Pendistribusian komoditas yang efisien akan menurunkan harga jual dan dapat menekan angka inflasi. Selain didukung dengan fasilitas pendukung, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan yang lebih intensif oleh personil Dinas Perhubungan yang dilakukan di sejumlah terminal, baik pengawasan dalam penertiban parkir kendaraan maupun kegiatan bongkar muat.

2. Evaluasi jumlah jaringan trayek menuju pusat perekonomian.

Hingga saat ini, jumlah jaringan trayek di Kabupaten Lombok Barat adalah 31 jaringan. Dalam hal jaringan trayek yang menghubungkan pusat perekonomian, dari keseluruhan jaringan tersebut, hanya 75% jaringan yang tergolong aktif, 25% diantaranya masih non aktif. Artinya belum ada angkutan/moda transportasi yang beroperasi dalam trayek

tersebut. Kebijakan ke depannya adalah mengaktifkan kembali koperasi angkutan khususnya pada jaringan non aktif, sehingga jumlah angkutan pedesaan mencukupi kebutuhan masyarakat dari dan menuju pusat perekonomian. Hal ini mendukung pemerintah secara tidak langsung dalam mengoptimalkan distribusi komoditas pangan utama kepada masyarakat sehingga dapat menekan angka inflasi.

3. Penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan di sepanjang jalur strategis menuju pusat perekonomian. Kondisi jalan yang mantap dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan memberikan dampak tidak langsung berupa kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pengemudi angkutan kendaraan barang maupun pelaku ekonomi lainnya yang berkegiatan di pasar. Mengurangi dampak kecelakaan lalu lintas sehingga distribusi berbagai komoditi utama pangan juga lancar.